

DAMPAK KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DOMESTIK TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK : PERAN THIN CAPITALIZATION SEBAGAI  
PEMODERASI

Michelyne Ayuthaya I<sup>1)</sup>, Richard F. Simbolon<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Universitas Advent Indonesia

<sup>1,2)</sup>[michelyneayuthaya@gmail.com](mailto:michelyneayuthaya@gmail.com), [richardfsimbolon@gmail.com](mailto:richardfsimbolon@gmail.com)

ABSTRACT

Tax avoidance is a common practice for companies to increase profits, but not desired by the governance. The realization of tax revenue from year to year has not reached the target. In fact, taxes are a source of financing to advance the nation through infrastructure improvements. The purpose of this study is to analyze and prove the effect of domestic institutional ownership as a component of corporate governance and thin capitalization on tax avoidance. Researchers chose companies in the mining sector listed on the Indonesia Stock Exchange website for the 2018-2019 period as the population. In determining the sample, the researcher chose companies that fit the criteria (purposive sampling). This study uses the classical assumption test analysis technique, absolute difference test, interaction test with MRA, and residual test. The results show that domestic institutional ownership has a negative effect on tax avoidance. And through the interaction test, it proves that the thin capitalization variable is not a moderator, but as an independent variable that has a positive impact on tax avoidance.

ABSTRAK

Penghindaran pajak adalah praktik yang lazim dilakukan perusahaan untuk meningkatkan laba, namun tidak diinginkan pemerintah. Realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum mencapai target. Padahal, pajak merupakan sumber pembiayaan untuk memajukan bangsa melalui peningkatan infrastruktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kepemilikan institusional domestik sebagai komponen *corporate governance* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Peneliti memilih perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar pada website Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019 sebagai populasi. Dalam menentukan sampel, peneliti memilih perusahaan yang sesuai dengan kriteria (*purposive sampling*). Penelitian ini menggunakan teknik analisa uji asumsi klasik, uji selisih mutlak, uji interaksi dengan MRA, dan uji residual. Hasil penelitian menunjukkan, kepemilikan institusional domestik memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan melalui uji interaksi, membuktikan bahwa variable thin capitalization bukanlah sebagai moderator, melainkan sebagai variabel independen yang memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak.

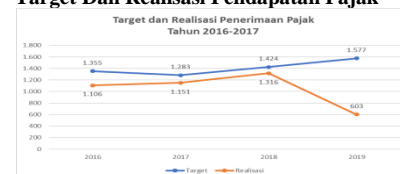
**Kata Kunci:** *penghindaran pajak; tata kelola perusahaan; kepemilikan institusional domestik; thin capitalization*

1. PENDAHULUAN

Praktik penghindaran pajak merupakan hal yang unik. Karena di satu sisi tidak melanggar dalam segi hukum, namun di sisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Karena dalam konteks perpajakan, adalah hal yang lazim bila perusahaan melakukan perencanaan keuangan melalui penghematan pembayaran pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak dipandang legal karena masih berada pada jalur hukum yang

berlaku, walaupun tidak dianggap benar dalam sudut pandang norma dan etika. (Salwah & Herianti, 2019). Hal inilah yang menimbulkan ketidaksungguhan dalam membayar pajak.

Gambar 1.  
Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak



Sumber: Data Diolah, 2020

Jika dilihat pada Gambar 1 memang terjadi peningkatan penerimaan perpajakan hingga tahun 2019, namun penerimaan perpajakan belum mencapai target. Padahal, pajak merupakan sumber dana untuk membangun bangsa melalui pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, pengembangan alat transportasi massa, pertahanan dan keamanan negara, subsidi, dan lainnya.

Banyaknya kasus penghindaran pajak menjadi faktor yang harus diperhatikan, mengingat pendapatan utama negara Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pertambangan. Indonesia hingga saat ini merupakan produsen batubara terbesar keempat di dunia dengan produksi batubara mencapai 561 juta ton, ini merupakan rekor produksi tertinggi sejak tahun 1981 (Aditiya, 2020). Sektor pertambangan Indonesia memiliki andil yang besar dalam menyumbang penerimaan negara baik melalui sektor pajak dan bukan pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sektor pertambangan rentan terhadap penggelapan pajak. KPK pernah mencatat sektor pertambangan kurang bayar pajak sebesar Rp15,9 triliun per tahun (Novriansa, 2019). Bahkan hingga tahun 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba mencapai Rp 25,5 triliun. Dengan demikian, negara kehilangan potensi penerimaan yang besar dari tahun ke tahun.

Pertambangan batubara diakui oleh negara sebagai sektor yang telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional selama beberapa dekade (I, 2019). Berkat kontribusi industri batu bara saat krisis ekonomi global 2008, kondisi ekonomi Indonesia tetap membaik. Predikat tersebut membuat industri pertambangan batubara tidak mendapat pengawasan ketat dari pemerintah sehingga sering terjadi praktik yang merusak lingkungan dan yang melanggar etika berupa penghindaran pajak.

Berdasarkan berita yang ditulis di situs Detik Finance, *Global Witness* mengeluarkan laporan investigasi atas dugaan praktik penghindaran pajak dari tahun 2009 hingga 2017 yang dilakukan oleh perusahaan PT Adaro Energy dengan mengurangi tagihan pajak hingga USD 125 juta atau setara dengan Rp1,75 triliun. Padahal perusahaan ini termasuk dalam predikat *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak.

Melalui globalisasi, transaksi jual beli antar negara semakin mudah terlepas dari jarak dan waktu. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi perusahaan untuk meningkatkan bisnisnya. Dalam berbisnis, selain sumber pendanaan internal, perusahaan juga membutuhkan sumber pendanaan dari pihak eksternal, yaitu para investor. Keunggulan kompetitif perusahaan menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi karena mereka ingin mendapatkan *return* yang sesuai dengan ekspektasi di masa depan.

Untuk memenuhi keinginan investor, manajer harus menciptakan strategi yang tepat. Tindakan manajer nantinya akan di kendalikan dan awasi oleh kepemilikan institusional domestik sebagai komponen dari *corporate governance* untuk memastikan bahwa manajer memprioritaskan kepentingan investor daripada kepentingan pribadi mereka. Kepemilikan institusional domestik akan mendorong manajer untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value* (Machfoedz, 2009). Dengan demikian, perusahaan akan meningkatkan profitabilitasnya dan mengurangi biaya operasional perusahaan.

Berkaitan dengan kepentingan manajer dalam praktiknya, pembayaran pajak diidentifikasi sebagai biaya yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga perlu dilakukan perencanaan meminimalkan beban pajak dengan menggunakan utang sebagai penyertaan modal. Dalam konteks *thin capitalization* pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang atau ekuitas dari pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dengan pihak peminjam.

Perusahaan utama akan memberikan penyertaan modal berupa utang kepada perusahaan anak. Dengan demikian, bunga yang dibebankan dapat menjadi pengurang atas utang pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi utang yang digunakan sebagai sumber pembiayaan, semakin tinggi pula bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (Alfandia, 2018)

Dengan demikian, semakin bertambahnya pembiayaan operasional perusahaan melalui utang, akan semakin kuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Karena diperlukan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan agar modal yang dikelola

dari ekuitas digunakan dengan maksimal dan penggunaan utang sebagai beban pajak tetap berada pada jalur penghindaran pajak (tax avoidance) yang bersifat legal, bukan bersifat ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion) (Ayu & Sumadi, 2019).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Kepemilikan Institusional Domestik, Thin Capitalization, dan Penghindaran Pajak

#### a. Corporate Governance

Penerapan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* yang dilatarbelakangi oleh struktur kepemilikan. (Astuti & Yuniarto, 2019) menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan menimbulkan masalah tata kelola perusahaan atau sering disebut dengan masalah keagenan.

Peneliti menggunakan variabel kepemilikan institusional domestik sebagai salah satu komponen dari mekanisme tata kelola perusahaan. Struktur kepemilikan ini terdiri dari lembaga keuangan, lembaga hukum, lembaga asing, dan lembaga lainnya.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan peningkatan upaya pengawasan untuk mencegah perilaku oportunistik oleh manajer. (Ismiati & Yuniati, 2017). Pengaruh kepemilikan institusional domestik terhadap manajemen perusahaan sangat diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan administrasi dengan pemegang saham. Pengukuran kepemilikan institusional domestik dengan cara membandingkan jumlah saham yang dimiliki lembaga institusional domestik dengan jumlah saham yang beredar. Dengan persamaan sebagai berikut (Prayoga & Almilia, 2013) :

$$KID = \frac{\text{saham dimiliki institusi domestik}}{\text{total sharesaham yang beredar}} \times 100\%$$

#### b. Thin Capitalization

Penghindaran pajak melalui tarif efektif dapat dilihat dari pilihan penyertaan modal perusahaan. Apakah perusahaan memilih untuk menggunakan pendanaan dengan modal, utang atau gabungan keduanya.

Mekanisme *thin capitalization* berhubungan kepada keputusan investasi yang dipilih perusahaan dalam operasional bisnis dengan memprioritaskan pembiayaan utang di atas penggunaan ekuitas dalam struktur modal (Taylor & Richardson, 2013). Hal ini karena

berbeda dengan dividen, utang dapat menjadi pengurang atas pajak terutang yang dapat meningkatkan laba bersih.

Perlu dicatat bahwa utang bisa menjadi pedang bermata dua. Melalui utang, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar melalui *tax shield*. Namun, jika sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan, perusahaan mungkin mengalami kerugian sebesar persentase laba yang diharapkan, bahkan mungkin lebih.

Debt to Equity (DER) adalah rasio yang mengukur sejauh mana utang perusahaan digunakan dengan membandingkan ekuitasnya dengan rumus :

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

#### c. Penghindaran Pajak

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) terbesar berasal dari penerimaan negara berupa pajak, berbeda dengan sumber pendapatan lain seperti penerimaan bukan pajak dan hibah (Leoni, 2019). Pajak yang diterima oleh negara menjadi sumber dana yang digunakan untuk pengaturan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial demi kesejahteraan masyarakat. Ketidapatuhan wajib pajak dapat mengakibatkan terganggunya sumber dana operasional negara salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak.

Melalui latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, kasus penghindaran pajak masih terus berlangsung dari tahun ke tahun sehingga pembayaran pajak belum dapat mencapai target. Tentu hal ini berakibat terganggunya keuangan negara.

Dalam mengukur tingkat penghindaran pajak, peneliti menggunakan rumus ETR. ETR digunakan sebagai acuan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan (Ardyansah, 2014) dengan cara membagi jumlah beban pajak dengan jumlah laba sebelum dikenakan pajak. Semakin tinggi nilai ETR di atas 25% sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, berarti perusahaan berusaha untuk menghindari pajak.

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Domestik terhadap Penghindaran Pajak

Investor institusional domestik sebagai bagian dari tata kelola perusahaan memiliki peran dalam mengendalikan kegiatan operasional perusahaan, salah satunya adalah pengelolaan pajak. Investor institusional domestik akan memantau, mengontrol, dan mempengaruhi manajer untuk mengurangi tarif pajak perusahaan tetapi tidak melanggar undang-undang perpajakan itu sendiri.

Perusahaan dengan kepemilikan institusional lebih dari 5% menunjukkan bahwa kemampuan mereka untuk mengawasi manajemer meningkat. (Merslythalia & Lasmana, 2016). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan lebih agresif dalam meminimalkan pembayaran pajaknya. Sehingga, semakin tinggi keterlibatan investor institusional akan semakin baik karena mekanisme penghindaran pajak oleh perusahaan diterapkan secara wajar (Sunarsih & Handayani, 2018).

H<sub>1</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

## 2.3. Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori *trade-off*, penggunaan modal operasional berupa utang dapat digunakan untuk menghemat pajak. Perusahaan akan memperoleh insentif berupa beban bunga yang dapat menjadi pengurang atas pajak yang dikenakan.

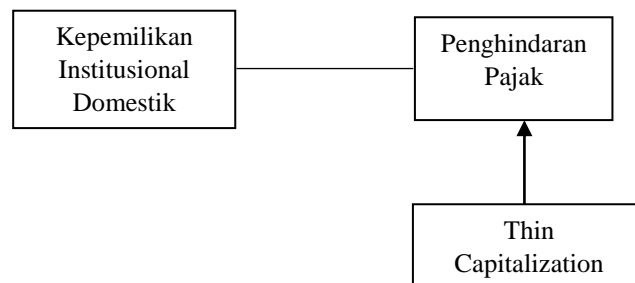
Hasil penelitian yang ditemukan oleh (Taylor & Richardson, 2013) menunjukkan *thin capitalization* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Australia. Perusahaan yang mendekati atau melebihi batas perbandingan utang dengan ekuitas diizinkan oleh pemerintah mengenai aturan *thin capitalization* cenderung menghindari pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Prastiwi & Ratnasari, 2019) yang menyatakan bahwa penggunaan utang berbasis bunga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Semakin tinggi penggunaan utang maka akan meningkatkan kesempatan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

H<sub>2</sub>: Thin Capitalization dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional domestik terhadap penghindaran pajak.

Model kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Konseptual



Sumber :Penulis, 2020

## 3. METODOLOGI

Objek penelitian ini adalah perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di website Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan populasi 49 perusahaan untuk periode 2018- 2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria (*purposive sampling*) sehingga diperoleh 16 perusahaan.

Kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel penelitian adalah:

- Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2019.
- Mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2019.
- Memiliki laporan keuangan yang melampirkan data terkait variabel yang akan diteliti.
- Tidak mengalami kerugian selama masa tahun studi.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI). [www.idx.com](http://www.idx.com) berupa data sekunder dan diolah dengan program SPSS versi 25.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviat ion
TA	38	,10	,74	,3061	,1311
KI	38	,01	,89	,4653	,3036
TC	38	,12	3,53	1,0739	,9066
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Berdasarkan Tabel 1 variabel terikat yaitu penghindaran pajak memiliki nilai minimum 0,10, nilai maksimum 0,74 dan nilai rata-rata 0,3061. Dengan demikian, rata-rata perusahaan sektor pertambangan memiliki tarif pembayaran pajak di atas standar pajak badan 1:4 atau setara 25% yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kepemilikan institusional domestik memiliki nilai minimal 0,01 dan maksimal 0,89 dengan nilai rata-rata 0,4368. *Thin capitalization* memiliki nilai minimum 0,12 dan nilai maksimum 3,53 dengan nilai rata-rata 1,0739, artinya bahwa perusahaan sektor pertambangan menggunakan utang tinggi sebagai modal operasionalnya.

**4.2. Koefisien Determinasi**

**Tabel 2 Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,589 <sup>a</sup>	,347	,309	,137

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Koefisien determinasi pada tabel 2 menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,347 yang berarti kontribusi kepemilikan institusional domestik dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak sebesar 34,7%, sedangkan 65,3% dijelaskan oleh variabel lain. Jika dilihat dari koefisien korelasi, terdapat hubungan yang moderat antara kepemilikan institusional domestik dengan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dilihat dari nilai  $r = 0,589$ .

**4.3. Tes Kelayakan Model**

**Tabel 3. Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,348	2	,174	9,291	,001 <sup>b</sup>
Residual	,655	35	,019		
Total	1,003	37			

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Uji F pada tabel 3 menunjukkan pengujian model dengan uji signifikan F dengan  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  atau  $9,291 > 3,200$  yang berarti  $H_0$  ditolak karena variabel bebas yaitu kepemilikan institusional domestik dan *thin capitalization* terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**4.4. Uji asumsi klasik**

**a. Auto Korelasi**

**Tabel 4. Durbin-Watson**

Model	Durbin-Watson
1	2,113

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Uji normalitas melalui durbin watson pada tabel 4 menampilkan hasil uji autokorelasi dengan data  $du < dW < 4-dU$  atau  $1.6231 < 2.170 < 2.376$ , sehingga hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat auto korelasi dalam penelitian ini.

**b. Uji Multikolinieritas**

**Tabel 5. Statistik Kolinearitas**

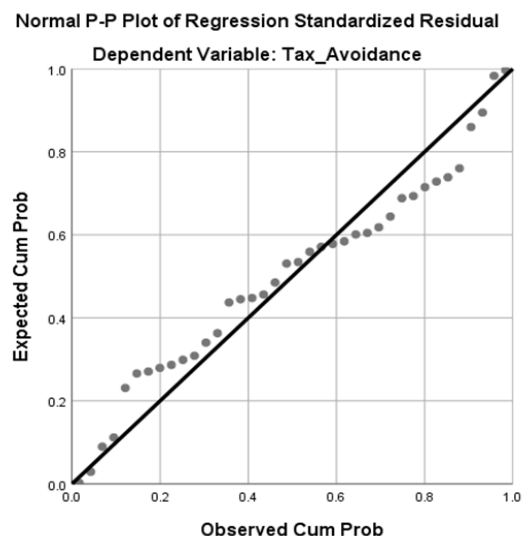
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KI	,993	1,007
	TC	,993	1,007

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Nilai Toleransi pada tabel 5 menunjukkan angka 0,968 atau lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF 1,033 atau kurang dari 10 yang berarti tidak terdapat multikolinieritas pada data yang akan diteliti.

**c. Uji Normalitas**

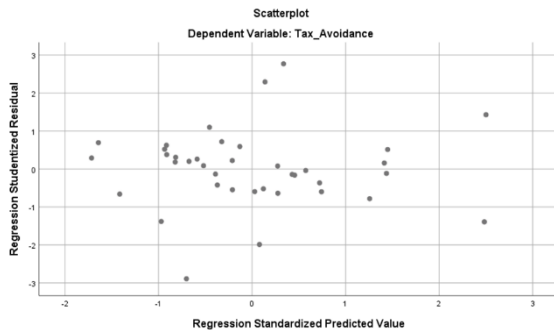
**Gambar 3. Plot PP**



Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

PP Plot pada gambar 3 menunjukkan bahwa titik plot berada mendekati garis diagonal. Maka diketahui uji diterima bahwa data terdistribusi normal.

Gambar 4. Scatterplot



Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Berdasarkan pengamatan pada scatterplot terlihat bahwa titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu dengan jelas. Dimana titik-titik tersebut tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5. Pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 6. Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	-,633	,034	-18,378	,000
KI	-,150	,043	-3,450	,001

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Bedasarkan hasil output SPSS 25 yang dihasilkan, maka persamaan regresi pertama adalah sebagai berikut:  $Y = -0,633 - 0,150 KI$ .

Dari hasil uji t diperoleh kepemilikan institusional domestik memiliki nilai t hitung > t tabel atau  $(-18,378 < 2,014)$  dengan nilai probability signifikansi  $(0,000 < 0,01)$  yang menyatakan bahwa variabel dependen kepemilikan institusional domestik ( $X_1$ ) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ( $Y$ ). Dengan demikian  $H_1$  ditolak.

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana terdapat hubungan kausal antar variabel yaitu kepemilikan institusi domestik dengan *thin capitalization* dalam hal terjadinya

penghindaran pajak. Berikut adalah hasil regresi linier berganda yang diolah:

Tabel 7. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-,612	,034		-18,139	,000
KI	-,142	,041	-,472	-3,441	,002
TC	,140	,061	,315	2,295	,028

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 7 menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan antara kepemilikan institusional domestik terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan diperolehnya persamaan regresi kedua sebagai berikut:

$$Y = -0,612 - 0,142 KI + 0,140 TC$$

Tabel 8. Analisis Regresi Dengan Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	-,615	,035	-17,776	,000
KI	-,146	,043	-3,409	,002
TC	,116	,083	1,389	,174
TCXKI	-,058	,133	-,435	,667

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Persamaan hasil regresi ketiga dari tabel 8 dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = -0,615 - 0,146 KI + 0,116 TC - 0,058 TC * KI$$

Hasil pada persamaan  $\alpha_3 TC * KI$ , menunjukkan  $\alpha_3$  tidak signifikan. Sedangkan pada persamaan kedua  $\alpha_2 TC$ , menunjukkan  $\alpha_2$  signifikan. Sehingga melalui perhitungan MRA, dapat diketahui bahwa variabel *thin capitalization* bukan variabel moderator, tetapi merupakan variabel independen, prediktor, exogenous, intervening, atau antecedent (Sugiono, 2004)

**Tabel 9. Uji Selisih Mutlak (Standardized Score)**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-,551	,036		-15,488	,000
Zscore(X)	-,077	,024	-,465	-3,254	,003
Zscore(Z)	,053	,023	,320	2,260	,030
Moderasi	,005	,025	,029	,199	,843

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Hasil output pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Z(X) secara individual memberikan nilai koefisien sebesar -0,077 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,003. Variabel Z(Z) memberikan nilai koefisien 0,053 dengan probabilitas signifikansi 0,003. Kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa undercapitalization tidak mengurangi pengaruh kepemilikan institusional nasional terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 10. Uji Residual (Unstandardized Score)**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,199	,121		1,653	,107
TA	-,181	,212	-,141	-,857	,397

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25,2020

Dari tabel 10, nilai koefisien paramter dari tax avoidance bernilai negatif namun tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melui uji residual, *thin capitalization* bukan merupakan pemoderasi.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Melalui perhitungan regresi tanpa variabel moderasi, dapat diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang berarti semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional domestik, semakin tinggi juga pengawasan terhadap manajerial dalam mengelola keuangan terutama pelaporan pajak sebagai sumber pendanaan negara. Kepemilikan institusional domestik lebih menekankan untuk mentaati peraturan

perpajakan di Indonesia, sehingga dalam pengelolaannya dilakukan mekanisme yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Merslythalia & Lasmana, 2016).

Hasil akhir dari uji interaksi, uji selisih mutlak dan uji residual menyimpulkan bahwa *thin capitalization* bukan sebagai moderator melainkan sebagai variabel independen yang memberikan pengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mendukung penelitian (Jumailah, 2020) yang menyatakan bahwa dengan semakin tingginya *thin capitalization* maka semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayar perusahaan yang akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang.

### 5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengujian pada penelitian ini hanya menggunakan satu komponen *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional domestik terhadap *tax avoidance*. Saran bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan komponen *corporate governance* secara komprehensif sehingga dapat melihat pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak secara utuh.
2. Variabel bebas pada penelitian ini hanya berkontribusi sebesar 35,4% terhadap penghindaran pajak. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak.
3. Penelitian ini hanya mengolah data dari perusahaan sektor pertambangan, sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti penghindaran pada sektor lain.
4. Penelitian ini mendapati hasil bahwa *thin capitalization* merupakan variabel independen dan dapat ditinjau lebih jauh oleh peneliti selanjutnya apakah *thin capitalization* dapat menjadi variabel intervening, exogenous, antecedent, atau predictor.
5. Perusahaan memerlukan kepemilikan institusional yang lebih banyak untuk mengurangi penghindaran pajak yang berlebih. Untuk menghindari praktik

penggelapan pajak yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan.

6. Manajer sebaiknya memperhatikan kembali pendanaan operasional melalui utang supaya tetap dalam proporsi yang wajar untuk menghindari ketidaksanggupan dalam membayar kewajiban dan opini negatif bagi investor.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, I. M., 2020, *No Title*, Goodnewsfromindonesia.Id. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/07/14/wow-indonesia-menjadi-salah-satu-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-di-dunia>
- Alfandia, N. S., 2018, *Pajak dan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia*, Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 17. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.6822>
- Ardyansah, D., 2014, *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr)*, Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 371–379.
- Astuti, C. D., & Yuniarto, F. E., 2019, *Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 3(2), 83. <https://doi.org/10.25105/jipak.v3i2.4452>
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K., 2019, *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan*, Widya Akuntansi Dan Keuangan Uniiiversitas Hindu Indonesia, 24–43.
- I, A. M., 2019, *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*, Katadata.Co.Id, [https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara?cfchlcaptcha=tk=2d69c1a65f4817348d6f7be3ed99e5d13ed47ae2-1621914088-0-AXKnFFEmH48Wz4LKgNrYppo4C8LkZ2yctqYRqqntipjrmZWf1B\\_VkF2uPcdOJaOvY4cc4W%0A](https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara?cfchlcaptcha=tk=2d69c1a65f4817348d6f7be3ed99e5d13ed47ae2-1621914088-0-AXKnFFEmH48Wz4LKgNrYppo4C8LkZ2yctqYRqqntipjrmZWf1B_VkF2uPcdOJaOvY4cc4W%0A)
- Ismiati, P. I., & Yuniati, T., 2017, *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang terhadap Kebijakan Dividen*, Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM), 6(3), 1–19.
- Jumailah, V., 2020. *Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi*, Management & Accounting Expose, 3(1), 13–21. <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.132>
- Leoni, G. A. A., 2019, *Pajak Sumbang Penerimaan Terbesar*, Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5d9ff4a0b01c4b456747b70b/Pajak-Sumbang-Penerimaan-Terbesar>
- Machfoedz, S. dan., 2009, *Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*, Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 13(3), 418–430.
- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S., 2016, *Komisaris Independen , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance the Effect of Executive Competency , the Firm Size , the Independent Commisioner and the Institutional Ownership Towards Tax Avoidance*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 11(2), 117–124.
- Novriansa, A., 2019, *Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing? DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422>
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R., 2019, *The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015*, AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 10(2), 119. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>
- Prayoga, E. B., & Almilia, L. S., 2013, *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 4(1). <https://doi.org/10.36448/jak.v4i1.237>
- Salwah, S., & Herianti, E., 2019, *Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak*, JRB-Jurnal Riset Bisnis, 3(1), 30–36. <https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.978>
- Sugiono, 2004, *Moderasi 3. Konsep*,



*Identifikasi, Alat Analisis Dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator*, 1(2), 61–70.

Sunarsih, U., & Handayani, P., 2018, *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Akuntansi, 12(2), 163–185. <https://doi.org/10.25170/jara.v12i2.87>

Taylor, G., & Richardson, G., 2013, *The Determinants of Thinly Capitalized Tax Avoidance Structures: Evidence From Australian Firms*, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22(1), 12–25. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1061951813000062>

